PENGGUNAAN HERMENEUTIKA DALAM PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM

(Oleh : Arga Febrian, S.H)

BAB I

PENDAHULUAN

Tugas seorang hakim tidak sekedar memutus perkara yang diajukan kepadanya akan tetapi sekaligus juga untuk menyelesaikan perkara atau pertikaian yang terjadi didalam masyarakat sehingga masing-masing pihak yang bersengketa merasa puas dan mendapatkan keadilan. Pada dasarnya, tugas seorang hakim adalah sebuah tugas yang mulia sebagaimana dikatakan Roeslan Saleh bahwa “penjatuhan pidana adalah suatu pergulatan kemanusiaan”, karena pada saat menjalankan tugasnya hakim harus menjalani pergulatan batin dan akal dimana hakim harus membuat pilihan-pilihan yang terkadang tidak mudah. Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan dihadapkan dengan aturan hukum, fakta-fakta perisdangan, dakwaan penuntut umum, pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Hakim dalam mengemban tugas tidaklah mudah karena hakim dianggap harus mewakili suara rakyat yang diam, dan tidak terwakili.

Produk hukum yang dibuat oleh hakim adalah putusan atau penetapan. Putusan merupakan suatu teks yang dipenuhi dengan pertimbangan hukum, sosial, dan psikologis dari apa yang diajukan oleh para pencari keadilan. Olehnya putusan hakim paling tidak minimal harus memenuhi tiga hal yaitu, harus legal dalam artian bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adil yaitu mampu merealisasikan kebaikan sebagai nilai tertinggi dari hukum yang dituangkan dalam pertimbangan putusannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu putusan tidak hanya serta merta dalam pertimbangannya terikat pada teks peraturan perundang-undangan melainkan dalam penerapan teks tersebut hakim harus mengemukakan alasan dan pandangan mereka dalam menerapkan teks pasal tersebut sehingga putusannya menjadi efektif dan dapat mencerminkan keadilan yang diharapkan.

Dalam perspektif hermeneutika, putusan pengadilan merupakan suatu proses pembuktian kebenaran hukum dari berbagai ragam sudut pandangan baik dari pandangan hukum, pandangan hukum adat setempat, pandangan budaya masyarakat setempat, pandangan tujuan sosial, pandangan ko-tekstual, pandangan kontekstual, dan pandangan psikologis terdakwa. Olehnya tidak heran jika dewasa ini perspektif hermeneutika dalam perkembangan ilmu hukum semakin menjadi syarat mutlak dalam interpretasi hukum dan mulai digunakan dalam praktek peradilan di Indonesia oleh sebagian kecil hakim.

Hermeneutika hukum merupakan salah satu kegiatan interpretasi terhadap teks-teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen hukum, naskah-naskah hukum dan doktrin

yang diungkapkan oleh para ahli. Selain interpretasi yang selalu digunakan dalam hukum pidana dan perdata seperti interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi teologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristis, interpretasi restriktif, dan interpretasi ekstensif, maka hermeneutika hukum juga dapat digunakan dalam penemuan hukum. Hermeneutika dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu hal yang khusus tetapi metode hermeneutika hanya merekonstruksi kembali dari seluruh permasalahan yang ada dan setelah didekonstruksi lalu kemudian disusun kembali untuk membentuk kesatuan yang baru sehingga menciptakan solusi yang terbaik dalam penanganan suatu perkara yang hukumnya dapat dikatakan kabur atau tidak jelas.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka agar hakim dalam memutus perkara tidak hanya sebagai proses yuridis yaitu hanya mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau Pembelaan Terdakwa disertai fakta-fakta persidangan semata melainkan juga melalui proses yang melibatkan perilaku masyarakat dan dapat mengayomi masyarakat maka perlu adanya perubahan pada metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui pendekatan hermeneutika hukum sebagai upaya membangun penafsiran hukum yang komprehensif sehingga konstruksi hukum tidak terjebak pada penafsiran teks semata tetapi mempertimbangkan keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasi sehingga nilai-nilai keadilan yang diharapkan muncul dalam putusan hakim dapat terwujud.

BAB II

PERMASALAHAN

Bahwa tujuan dari dibentuknya hukum adalah untuk keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini selaras dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang mengatakan jika ketiga tujuan diatas orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Namun tiga nilai tersebut, dalam praktik diperadilan terutama dapat dilihat dari putusan hakim terutama dalam perkara pidana, bahwa sulit untuk dipadukan antara keadilan, dan kepastian hukum. Terkadang jika kita lebih menitikberatkan pada keadilan maka kepastian hukum tidak akan terpenuhi sebab tidak ada peraturan hukum yang sempurna. Begitu juga jika kita menitikberatkan pada kepastian hukum, maka keadilan akan terabaikan, hal ini dapat dilihat dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Perusahaan Perjalanan First travel dimana demi mengejar kepastian hukum, puluhan ribu jamaah yang telah menyetorkan uangnya kepada first travel harus merelakan uangnya karena berdasarkan putusan pengadilan aset first travel yang di dalam dakwaan penuntut umum diminta dikembalikan kepada korban justru dirampas untuk negara.

Olehnya antara keadilan dan kepastian hukum itu sangat penting dan harus dapat dipadukan antara satu dan yang lain, karena tanpa keadilan dalam putusan maka hukum hanya akan menjadi alat pemaksa yang tidak melihat kepentingan masyarakat, namun disisi lain tanpa adanya kepastian hukum dalam suatu putusan maka masyarakat tidak mengetahui apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan dimasyarakat yang dapat menyebabkan ketidakberaturan padahal hukum juga digunakan untuk menciptakan suatu keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Olehnya agar dapat menjawab tantangan tersebut, maka dalam tulisan ini akan membahas terkait “ **Penggunaan Hermeneutika hukum dalam penemuan hukum oleh Hakim**” untuk mencapai putusan yang adil tetapi juga mencerminkan kepastian hukum.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tentang Hermeneutika

Undang-undang, sebagaimana kaedah hukum pada umumnya, adalah untuk melindungi kepentingan manusia, oleh karena itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Untuk dapat melaksanakannya, undang-undang harus dibuat secara jelas. kejelasan setiap undang-undang ini sangat penting. Oleh karena itu setiap undang-undang dilengkapi penjelasan yang dimuat dalam tambahan Lembaran Negara. Namun demikian, tidak selalu penjelasan undang-undang dapat memperjelas bunyi pasal dalam undang-undang. Hermeneutika merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang terhadap teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim dengan menggunakan Hermeneutika merupakan metode interpretasi untuk mengetahui makna sesungguhnya yang termuat dalam teks pasal –pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dimana dalam peristiwa tersebut masih kabur atau tidak jelas bagaimana pengaturan hukum terkait peristiwa konkrit tersebut maka dibutuhkan metode penafsiran yaitu Hermeneutika yang tidak memandang suatu pasal hanya dari teks semata melainkan melakukan dekonstruksi dan merekonstruksi kembali makna yang ada dalam teks pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan hermeneutika, perlu dijelaskan kronologi asal-usul kata hermeneutika, supaya tidak terjadi distorsi pemaknaan sejarah hermeneutika. Secara etimologis kata “hermeneutika” itu berasal dari bahasa Yunani kata kerja “Hermeneuein” yang berarti menafsirkan atau menginterpretasi, kata benda “hermenia” yang berarti penafsiran atau interpretasi. Secara filosofis, sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer, hermeneutika hukum mempunyai tugas ontologis yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa sekarang, yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali. Kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus yaitu pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum. Dimana interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. Kemudian yang kedua Hermeneutika sebagai metode penemuan hukum melalui interpretasi teks hukum selalu menjadi diskursus

utama dalam setiap kajian hermeneutika hukum. Hal ini tidak terlepas dari substansi filsafat hermeneutika adalah tentang hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilosofan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpretasi.

Hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus yaitu pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum. Dimana interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. Menurut Gadamer ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu harus memenuhi subtilitas intelegensi (ketepatan pemahaman), subtilitas explicandi (ketepatan penjabaran), dan subtilitas applicandi (ketepatan penerapan). Maka tidak berlebihan jika para pakar hukum, ilmu sosial dan filsafat beranggapan bahwa hermeneutika hukum merupakan alternatif yang tepat dan praktis untuk memahami naskah normatif. Kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai pengaruh besar dengan “teori penemuan hukum”. Hal ini ditunjukkan dalam kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Karena dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam bingkai kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam bingkai fakta-fakta termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum modern.

B. Hermeneutika sebagai metode penemuan hukum hakim dipengadilan

Pada proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), perlu dibedakan dua hal yaitu mengenai tahap sebelum pengambilan putusan (*ex ante*) dan tahap sesudah pengambilan putusan (*ex post*). Dalam perspektif teori penemuan hukum modern, yang terjadi sebelum pengambilan putusan disebut “heuristika”, yaitu proses mencari dan berfikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Pada tahap ini berbagai argument pro-kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dengan yang lain, kemudian ditemukan makna yang tepat. Sedangkan penemuan hukum yang terjadi sesudah putusan disebut “legitimasi”, dan legitimasi selalu berkenaan dengan pembenaran dari putusan yang sudah diambil. Pada tahap ini putusan diberi motivasi (pertimbangan) dan argumentasi secara substansial, dengan cara menyusun suatu penalaran yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu putusan pengadilan tidak bisa diterima oleh forum hukum, maka berarti putusan itu tidak memperoleh legitimasi. Konsekuensinya, premis-premis yang baru harus diajukan, dengan tetap berpegang pada penalaran *ex ante*, untuk meyakinkan forum hukum tersebut agar putusan tersebut dapat diterima.

Pentingnya hermeneutika hukum berperan sekaligus digunakan oleh para hakim pada saat menemukan hukum. Penemuan hukum oleh Hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. Menurut Gadamer, metode hermeneutika hukum pada hakikatnya sangat berguna, ketika seorang hakim menganggap dirinya berhak untuk menambah makna orisinal dari teks hukum. Bahkan pengalaman Hakim pada saat menemukan hukum dalam praktek dipengadilan memberikan dukungan bagi konsepsi pragmatis dan interpretasinya. Oleh karena itulah hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dipengadilan. Untuk memperjelas penerapan hermeneutika hukum akan dipaparkan putusan pengadilan di Amerika sebagai ilustrasi dalam penerapan metode hermeneutika hukum oleh Hakim dipengadilan.

Putusan tersebut adalah putusan pengadilan kasus Marbury versus Madison (1803). Putusan terhadap kasus Marbury versus Madison ini menandai lahirnya lembaga “Judicial Review, untuk pertama kalinya dalam tatanan sistem hukum di Amerika Serikat. Dimana dalam kasus ini John Marshal selaku Chief of Justice dari supreme court, telah menolak untuk mengeluarkan writ of mandamus, yaitu suatu perintah pengadilan kepada pejabat pemerintah untuk melakukan perbuatan tertentu yang merupakan salah satu kewajiban dari pejabat tersebut, yang dituntut oleh William Marbury kepada James Madison selaku secretary of state. Alasannya, dasar hukum penuntutan hak tersebut yaitu pasal 13 judicial act (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) tahun 1789 yang dirumuskan oleh kongres, dianggap menambahkan kewenangan supreme court dari kewenangan yang tercantum dalam konstitusi Amerika Serikat. Oleh karena itu, ketentuan tersebut adalah inkonstitusional dan tidak sah. Sebab, Undang-Undang tidak bisa mengubah konstitusi yang merupakan “the supreme law of the land” (asas *lex superior derogate leg inferiori*). Doktrin judicial review memperoleh kekuatan hukum ketika John Marshal memutuskan kasus Marbury versus Madison tersebut pada bulan Februari 1803. Dalam usahanya memberikan putusan yang tepat, Marshall menalar secara hermeneutika. Premis yang muncul berdasarkan penalaran secara hermeneutika antara lain yaitu a. Masa lalu: masalah itu muncul karena kelalaian Jhon Marshall sendiri. b. Masa kini: ada perseteruan politik antara partai republik (Thomas Jefferson) dengan partai federalis (John Adam). c. Masa depan: kemungkinan muncul konflik terbuka antara lembaga kepresidenan dengan supreme court, bila tuntutan Marbury dikabulkan, yang bisa membahayakan keutuhan nasional.

Dengan dalih mempertimbangkan dan menyelaraskan ketiga kepentingan diatas, John Marshall dalam putusannya berusaha mencari titik temu dalam kasus tersebut dengan cara mendialogkan antara konstitusi Amerika Serikat, judicial act, fakta yuridis, kondisi sosial politik, serta kepentingan dirinya dan lembaga yang dia pimpin. Pertimbangan yang dia lakukan itu merupakan pertimbangan atas dasar nilai, dan keputusan yang dia ambil merupakan wujud dari kebijaksanaannya. Dengan interpretasi hermeneutika atas lafal sumpah jabatannya sebagai hakim dengan asas “*ius curia novit*” dan pada akhirnya dapat memperjelas maksud konstitusi. Akibatnya lahir suatu temuan baru dibidang hukum berupa lembaga judicial review, yang keberadaannya diakui di Amerika Serikat hingga sekarang.

Dalam menggunakan penafsiran Hermeneutika, dalam memahami dan memaknai suatu teks dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendekonstruksi teks dalam pasal tersebut yang dikenal dengan kontekstualitas. Adapun Dekonstruksi adalah mencoba menafsirkan atau menghadirkan makna teks dalam pasal tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dalam konteks masa kini. Makna teks tidak tergantung pada konteks penulisan, namun tergantung pada konteks pembacaan sesuai dengan kebutuhan perkara tersebut. Hermeneutika merupakan pilihan yang paling baik ditengah-tengah ketidakpastian hukum yang belum mengatur secara limitatif terhadap suatu peristiwa tapi dengan tidak keluar dari pasal tersebut. Misalnya dalam perkara First Travel, dimana pihak Penuntut Umum meminta aset First Travel dikembalikan kepada para korban, namun Putusan Pengadilan Negeri Depok yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung berpandangan lain, dengan mendasarkan pasal 39 KUHP yang berbunyi “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas “. Dengan melakukan penafsiran secara Hermeneutika kalimat *dapat dirampas* bukan merupakan suatu kewajiban tetapi merupakan suatu pilihan jika dalam keadaan tertentu barang yang merupakan hasil kejahatan tersebut memenuhi syarat untuk dirampas untuk negara. Misalnya barang tersebut merupakan hasil kejahatan dilakukan oleh korporasi sebagaimana tertuang didalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak pidana pencucian uang dapat dirampas untuk negara.

Dengan demikian metode Hermeneutika merupakan metode yang paling tepat dalam proses penemuan hukum oleh hakim, dimana metode ini tidak mungkin adanya pertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan tetap mementingkan dampak sosial yang akan muncul ketika putusan hakim tersebut dipublikasi. Karena dalam melakukan penafsiran dan penemuan hukum yang harus diperhatikan oleh hakim dalam melakukan penafsiran adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Dekonstruksi terhadap teks hukum yang dianggap kurang jelas atau kabur maksudnya mencoba menafsirkan atau menghadirkan makna teks dalam pasal tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dalam konteks masa kini;
2. Kemudian setelah melakukan pemaknaan, lalu mencocokkan dengan permasalahan yang ada dengan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek budaya hukum yang berlaku;
3. Lalu merekonstruksi kembali makna dan pokok permasalahan untuk mencapai suatu temuan hukum dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang sedang didadili oleh hakim dipersidangan.
4. Terakhir adalah mempertimbangkan dampak sosial putusan tersebut, hakim harus memiliki pandangan luas, bahwa putusannya saat dipublikasi ke masyarakat maka itu menjadi milik publik olehnya dalam memutuskan suatu perkara harus tetap melakukan analisa dampak sosial dari setiap putusan yang dikeluarkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hermeneutika hukum penting digunakan oleh para hakim pada saat menemukan hukum. Penemuan hukum oleh Hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. Menurut Gadamer, metode hermeneutika hukum pada hakikatnya sangat berguna, ketika seorang hakim menganggap dirinya berhak untuk menambah makna orisinal dari teks hukum. Oleh karena itulah hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum/peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dipengadilan

Interpretasi teks yuridik berlangsung dalam proses lingkaran pemahaman yang disebut lingkaran hermeneutik (*hermeneutische zirkel*), yakni gerakan bolak-balik antara bagian atau unsur-unsur dan keseluruhan sehingga terbentuk pemahaman yang utuh. Dalam proses pemahaman ini, tiap bagian hanya dapat dipahami secara tepat dalam konteks keseluruhan, sebaliknya keseluruhan ini hanya dapat dipahami berdasarkan pemahaman atas bagian-bagian yang mewujudkannya. Dengan demikian, pada setiap interpretasi teks yuridik berlangsung pertemuan antara dua cara pandang, yakni dari interpretandum (teks yuridik) dan dari interpretator. Perpaduan tersebut dapat menghasilkan pemahaman baru pada interpretator tentang kaidah hukum yang terkandung dalam teks yuridik itu. Sebagai sebuah metode penemuan makna teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi.

B. Saran

Dalam proses pengadilan yang berakhir dengan putusan pengadilan oleh hakim, perlu memetakan secara jelas setiap argumen, data, fakta, atau bukti-bukti yang terungkap di pengadilan, baik berdasarkan keterangan saksi, surat, observasi lapangan, maupun pertimbangan hukum hakim (terutama tentang pokok perkara) guna menjamin objektivitas, validitas, kredibilitas, *respectability* (kehormatan), dan *intelligibility* (keterpahaman) penafsiran.